PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan.

P-RENJA Tahun 2020, merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Blitar seperti RPJP, RPJMD, RKPD serta dokumen RENSTRA PD 2016-2021, yang disusun sebagai upaya untuk pencapaian RENSTRA PD untuk periode 1 (satu) tahun yang didalamnya memuat memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan berpedoman pada P-RENJA 2020 ini diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dengan diliputi semangat ***"One For All, All For One"*** dapat dilakukan dengan lebih baik dan dapat mendukung pembangunan Kota Blitar tahun 2020 yang bertema ***"Pemantapan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas"***.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan P-RENJA Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2020.

Blitar, 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH

Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601219 198702 1 003

DAFTAR ISI

		hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Landasan Hukum	I - 2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I - 4
	1.4 Sistematika Penulisan	I - 4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020	II - 1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 22
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 27
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	II - 28
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 45
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
	3.1 Telaahan terhadap APBD Kota Blitar	III - 1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 2
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV - 1
BAB V	PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019	II - 2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar.....	II - 14
Tabel 2.3	Perubahan Tema dan Prioritas Daerah Tahun 2020	II - 19
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2020 Kota Blitar	II - 22
Tabel 3.1	Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan.....	III - 2
Tabel 3.2	Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020	III - 3
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021	IV - 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran RKPD Kota Blitar Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2020. Pada akhir triwulan I hingga triwulan II terjadi bencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran Covid-19 memberikan dampak di bidang ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat Kota Blitar. Kondisi ini tentunya harus dikendalikan, maka perlu dilaksanakan perubahan dalam perencanaan pembangunan tahun 2020 menyesuaikan dengan kebijakan nasional untuk penanganan Pandemi Covid-19. Perubahan kebijakan terkait asusmsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan, serta rencana program dan kegiatan tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan Kota Blitar yang fokusnya digeser untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, disamping tetap mengarahkan pada percepatan kinerja jangka menengah daerah;
2. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang mengalami perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta

penyesuaian belanja daerah, baik belanja tidak langsung dan belanja langsung;

3. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) Tahun 2019 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2020 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah dan kegiatan yang dipandang prioritas yang penting serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

Sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 Kota Blitar. P-Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2020 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 52);

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2020;

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2020;
- Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
- Menjaga keberlangsungan dan kesinambungan program – program pembangunan pemerintah serta mewujudkan konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2020 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**,

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020**

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal P-RKPD

Tahun 2020, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**,

Bab ini menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**,

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang disertai perubahan pendanaan.

BAB V **PENUTUP**,

Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2020.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2020

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operaional, laporan arus kas, laporan peruabahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=4+6+8	10=9/3
PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	95 %	87 %	90 %	95,91 %	106,57%	93 %	93 %	97,89%
Fasilitasi pelayanan sosial keagamaan	Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi	10 Unit	16 Unit	0 unit	0 unit				0,00%
	jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi	1.770 Orang	1688 Orang	1750 orang	1669 orang	95,37%	1800 orang	1800 orang	101,69%
	jumlah event keagamaan / pengajian yang terfasilitasi	10 even	8 even	8 even	10 even	125,00%	10 event keagamaan/ pengajian	10 event keagamaan/ pengajian	100,00%
	jumlah cabang lomba mtq yang diikuti	6 Cabang Lomba	6 Cabang Lomba	6 cabang	6 cabang	100,00%	6 cabang	6 cabang	100,00%
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kaidah penulisan, isi dan kewenangan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	10 raperda	8 perda	3 raperda	5 raperda	166,67%	10 perda	10 perda	100,00%
	Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	60 perwali	71 perwali	70 perwali	83 perwali	118,57%	70 perwali	70 perwali	116,67%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	600 SK	639 SK	500 SK	443 SK	88,60%	500 SK	500 SK	83,33%
Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kedinasan	Jumlah Fasilitasi Kasus Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kedinasan	3 Kasus	3 Kasus	3 kasus	3 kasus	100,00%	3 Kasus	3 Kasus	100,00%
	Jumlah Peserta Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	600 orang	500 orang	600 orang	600 orang	100,00%	600 orang	600 orang	100,00%
Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	600 orang	500 orang	600 orang	500 orang	83,33%	600 orang	600 orang	100,00%
	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100,00%	2 Produk Hukum	2 Produk Hukum	100,00%
fasilitasi evaluasi roadmap reformasi birokrasi	Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	2 kebijakan	2 kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100,00%	2 kebijakan	2 kebijakan	100,00%
updating standar jabatan	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	1.400 jabatan	300 jabatan	1400 jabatan	1.400 jabatan	100,00%	1400 jabatan	1400 jabatan	100,00%
	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	50 jabatan	300 jabatan	300 jabatan	300 jabatan	100,00%	900 jabatan	900 jabatan	1800,00%
	Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	1.400 jabatan	300 jabatan	1400 jabatan	1.400 jabatan	100,00%	1400 jabatan	1400 jabatan	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah jenis Dokumen Pelaporan yang disusun	4 Dokumen	6 Jenis	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	6 Jenis	6 Jenis	150,00%
	jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah	6 koordinasi	6 koordinasi	6 koordinasi	6 koordinasi	100,00%	6 koordinasi	6 koordinasi	100,00%
	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain	6 kerjasama	2 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	100,00%	6 kerjasama	6 kerjasama	100,00%
	Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	2 even	2 even	2 even	2 even	100,00%	2 even	2 even	100,00%
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta rakor kewilayahan	129 orang	129 orang	129 orang	129 orang	100,00%	129 orang	129 orang	100,00%
	Jumlah tingkatan lomba kelurahan yang difasilitasi	2 lomba	2 lomba	1 lomba	1 lomba	100,00%	1 lomba	1 lomba	50,00%
	Jumlah lomba sinergitas kecamatan yang difasilitasi	1 lomba	1 lomba	1 orang	1 orang	100,00%	1 lomba	1 lomba	100,00%
	Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21 kelurahan	21 kelurahan	21 lomba	21 lomba	100,00%	21 kelurahan	21 kelurahan	100,00%
	Jumlah peserta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	857 orang	857 orang	0 orang	- orang		857 orang	857 orang	100,00%
	Jumlah partisipasi lomba BBGRM yang diikuti dalam berbagai tingkatan	1 lomba	2 lomba	1 lomba	1 lomba	100,00%	1 lomba	1 lomba	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyusunan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD dengan predikat nilai pelaporan kinerja minimal memuaskan	27 OPD	0 OPD	24 OPD	23 OPD	95,83%	27 OPD	27 OPD	100,00%
	Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	29 OPD	29 OPD	29 OPD	24 OPD	82,76%	29 OPD	29 OPD	100,00%
	Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	24 OPD	24 OPD	24 OPD	24 OPD	100,00%	24 OPD	24 OPD	100,00%
	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat baik	28 OPD	26 OPD	27 OPD	29 OPD	107,41%	28 OPD	28 OPD	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	9 rumusan kebijakan	0 rumusan kebijakan	5 rumusan kebijakan	5 rumusan kebijakan	100,00%	9 rumusan kebijakan	9 rumusan kebijakan	100,00%
	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	5 rumusan kebijakan	0 rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan	16 rumusan kebijakan	160,00%	5 rumusan kebijakan	5 rumusan kebijakan	100,00%
Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	4 draf rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan	6 draf rumusan	9 draf rumusan	150,00%	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	150,00%
Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	5 draf rumusan kebijakan	5 rumusan kebijakan	5 draf rumusan	5 draf rumusan	100,00%	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	120,00%
Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	5 draf rumusan kebijakan	0 draf rumusan kebijakan	10 draf rumusan	16 draf rumusan	160,00%	10 rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan	200,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Presentase penyerapan anggaran DBHCHT Kota Blitar	95 %	94 %	90 %	90 %	100,00%	93 %	93 %	97,89%
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	300 Orang	200 Orang	200 orang	200 orang	100,00%	200 Orang	200 Orang	66,67%
	Jumlah publikasi pada media massa:						4 media	4 media	
	Media Radio	900 siar	414 siar	150 siar	165 siar	110,00%	120 siar	120 siar	13,33%
	Media Cetak	89 terbit	1 terbit	1 terbit	0 terbit	0,00%	1 terbit	1 terbit	1,12%
	Spanduk	9 unit	21 unit	21 unit	32 unit	152,38%	51 unit	51 unit	566,67%
	Baliho	3 unit	6 unit	4 unit	4 unit	100,00%	4 unit	4 unit	133,33%
	Jumlah publikasi pada Event Daerah	4 even	0 even	4 even	4 even	100,00%	4 Event	4 Event	100,00%
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	90 %	64 %	70 %	64,18 %	91,69%	80 %	80 %	88,89%
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	jumlah pedoman yang tersusun	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman	1 Pedoman	100,00%	1 Pedoman	1 Pedoman	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan , penataaan ruang, perumahan dan permukiman, LH, Perhubungan, Kehutanan, ESDM serta bidang program administrasi pembangunan.	5 draf rumusan kebijakan	4 Kebijakan	5 rumusan kebijakan	5 rumusan kebijakan	100,00%	5 rumusan kebijakan	5 rumusan kebijakan	100,00%
Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
	Jumlah rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan .	10 draf rumusan kebijakan	10 Kebijakan	10 rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan	100,00%	10 rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan	100,00%
	Jumlah jenis Dokumen Pelaporan yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
Penyusunan Dan Pelaporan Perencanaan Pembanguan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	8 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	7 Dokumen	7 Dokumen	87,50%
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement	100 %	78 %	97 %	97,8 %	100,82%	99 %	99 %	99,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	98 Paket Lelang / Seleksi	86 Paket Lelang/ Seleksi	97 Lelang/ Seleksi	91 Lelang/ Seleksi	93,81%	97 Paket Lelang Seleksi	97 Paket Lelang Seleksi	98,98%
	jumlah fasilitasi dokumen pengadaan barang/jasa	98 Dokumen	108 Dokumen	97 Dokumen	91 Dokumen	93,81%	97 Dokumen	97 Dokumen	98,98%
Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis :								
	Pejabat Pengadaan	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	100,00%	70 Orang	70 Orang	100,00%
	UKPBJ dan Pokja	26 Orang	30 Orang	26 Orang	26 Orang	100,00%	26 Orang	26 Orang	100,00%
	PA /KPA	68 Orang	0 Orang	68 Orang	68 Orang	100,00%	68 Orang	68 Orang	100,00%
	PPK	120 Orang	0 Orang	120 Orang	120 Orang	100,00%	120 Orang	120 Orang	100,00%
	Jumlah Personil yang mengikuti Forum IPFE, JFT dan Seminar dll)	12 Orang	0 Orang	12 Orang	8 Orang	66,67%	12 Orang	12 Orang	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Persentase partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	4 even	5 even	5 even	100,00%	5 even	5 even	100,00%
	jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	12 Orang	12 Orang	12 orang	12 orang	100,00%	12 Orang	12 Orang	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yg tersedia	48 macam	49 macam	45 macam	45 macam	100,00%	45 macam	45 macam	93,75%
	Jumlah barang cetakan yg tersedia	28 cetakan	41 cetakan	28 cetakan	28 cetakan	100,00%	28 cetakan	28 cetakan	100,00%
	Jumlah lembar penggandaan	60.000 lembar	73969 lembar	60.002 lembar	57.147 lembar	95,24%	60.000 lembar	60.000 lembar	100,00%
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100,00%	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan	100,00%
	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	2.500 dos/kotak	10000 dos/kotak	1750 dos/kotak	1.750 dos/kotak	100,00%	1750 dos/kotak	1750 dos/kotak	70,00%
	Jumlah porsi mamin yang tersedia	25.000 porsi	25000 porsi	1750 porsi	2.501 porsi	142,91%	1750 porsi	1750 porsi	7,00%
	jumlah cinderamata khas daerah yang tersedia	3 macam	0 macam	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	3 macam	3 macam	100,00%
Penyusunan Dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun (IKM)	1 dokumen	0 dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100,00%	4 rekening	4 rekening	100,00%
	jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	65 kendaraan	17 kendaraan	24 unit	53 unit	220,83%	65 kendaraan	65 kendaraan	100,00%
	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 komponen	29 komponen	0 komponen	0 komponen		29 komponen	29 komponen	100,00%
	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40 macam	40 macam	40 Macam	40 Macam	100,00%	40 macam	40 macam	100,00%
	jumlah bangunan kantor yang terbangun	1 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit		0 unit	0 unit	0,00%
	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	12 macam	12 macam	3 macam	5 macam	166,67%	12 macam	12 macam	100,00%
	jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam	8 macam	5 macam	12 macam	240,00%	8 macam	8 macam	100,00%
	jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	3 macam	4 macam	0 unit	0 unit		3 macam	3 macam	100,00%
	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam	3 macam	3 macam	7 macam	233,33%	3 macam	3 macam	100,00%
	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100,00%	17 unit	17 unit	100,00%
	jumlah bangunan kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	3 unit	5 unit	166,67%	4 unit	4 unit	133,33%
	jumlah bangunan kantor yang terehab	0 unit	0 unit	1 unit	3 unit	300,00%	1 unit	1 unit	
	jumlah rumah dinas yang terpelihara	3 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100,00%	3 unit	3 unit	100,00%
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	0 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yg diikuti regional dan nasional	190 rapat koordinasi	180 rakor	190 rakor	207 rakor	108,95%	190 rakor	190 rakor	100,00%
Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	64 orang	48 orang	51 Orang	51 Orang	100,00%	55 orang	55 orang	85,94%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100 %	100 %	100 %	72 %	72,00%	100 %	100 %	100,00%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi	25 macam	25 macam	25 Macam	23 Macam	92,00%	25 macam	25 macam	100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Prosentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	80 %	83,50 %	78 %	80 %	102,56%	80 %	80 %	100,00%
	Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	78 %	85,71 %	75 %	92,86 %	123,81%	78 %	78 %	100,00%
fasilitasi kehumasan pimpinan dan pemerintah daerah	jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah:								
	Foto	3.000 lembar	2960 lembar	3000 lembar	3000 lembar	100,00%	3000 lembar	3000 lembar	100,00%
	Video	10 Video shooting	4 Video shooting	9 keping	9 keping	100,00%	10 Video Shooting	10 Video Shooting	100,00%
	Motion Graphic	9 motion graphic	0 motion graphic	0	0		3 Motion Graphic	3 Motion Graphic	33,33%
	Spanduk	70 buah	72 buah	80 buah	71 buah	88,75%	60 buah	60 buah	85,71%
	Joglo	15 unit	11 unit	23 buah	23 buah	100,00%	20 unit	20 unit	133,33%
	Baliho	18 unit	28 unit	12 buah	12 buah	100,00%	15 unit	15 unit	83,33%
	mini Banner	40 buah	45 buah	40 buah	20 buah	50,00%	40 buah	40 buah	100,00%
	Umbul-umbul	40 buah	20 buah				6 buah	6 buah	15,00%
	Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020	
				Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 Jumpa Pers	2 jumpa pres	2 jumpa pres	100,00%	2 jumpa pres	2 jumpa pres	100,00%
	Media Radio	539 siar	534 siar	425 siar	425 siar	100,00%	300 siar	300 siar	55,66%
	Media Televisi	52 siar	55 siar	53 siar	53 siar	100,00%	50 siar	50 siar	96,15%
	Media Cetak	315 terbit	459 terbit	538 terbit	538 terbit	100,00%	320 terbit	320 terbit	101,59%
	Media Online			2 rakor	2 rakor	100,00%	500 terbit	500 terbit	
	Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun	345 Naskah	316 Naskah	230 naskah	230 naskah	100,00%	320 Naskah	320 Naskah	92,75%
	Jumlah Rakor Bakohumas	2 rakor	1 rakor	0	0		2 rakor	2 rakor	100,00%
fasilitasi keprotokolan dan acara kedinasan pemerintah daerah	Jumlah fasilitasi acara dan upacara sesuai standar keprotokolan								
	upacara	9 upacara	0 upacara	8 upacara	15 upacara	187,50%	10 upacara	10 upacara	111,11%
	penerimaan tamu	30 penerimaan	13 penerimaan	25 penerimaan tamu	28 penerimaan tamu	112,00%	32 penerimaan	32 penerimaan	106,67%
	acara	3 even	2 even	3 even	3 even	100,00%	2 even	2 even	66,67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh OPD perlu dilakukan pengukuran kinerja sehingga diperoleh gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan terhadap kegiatan, program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Pencapaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2019 berdasarkan pengukuran kinerja terhadap setiap indikator kegiatan, program dan kebijakan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renja PD tahun 2019 dapat dikatakan sangat berhasil

Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Blitar

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase peningkatan tempat ibadah yang representatif	-	-	-	-	1%	1%	1%	-	-	1,13%	1%	1%	
	Persentase tempat ibadah yang terfasilitasi	-	-	90%	95%	-	-	-	5%	9%	-	-	-	
	Persentase jumlah pengajar agama yang terfasilitasi	-	-	90%	95%	-	-	-	90%	93%	-	-	-	
2	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	di bidang Perekonomian													
5	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	
7	Nilai SAKIP Setda minimal B	-	-	B	B	B	B	B	BB	BB	A	B	B	
8	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	90%	91%	92%	93%	93%	88%	86%	92,86%	93%	93%	
9	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Sekretariat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
10	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
11	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	
13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	

Keberhasilan pencapaian dalam mewujudkan misi organisasi melalui kegiatan, program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh OPD sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengikutinya, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambat.

Adapun faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal :

a. Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki fungsi strategis sebagai perumus kebijakan daerah dan membantu Walikota dalam menyusun,menetapkan, dan mengoordinasikan penerapan kebijakan pemerintah daerah serta mengoordinasikan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
b. sebagai unsur *staffing,* Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam penyusunan, penetapan dan fasilitasi penerapan kebijakan pemerintah daerah ;
c. Sekretariat Daerah memiliki fungsi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan ;
d. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;
e. Lokasi kantor cukup strategis;
f. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;
g. Sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas telah tersedia dan memadai;
h. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja
i. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dalam hal perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
j. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi bagian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah;

2. Faktor Eksternal:

a. Cepatnya perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan ;
b. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan kemasyarakatan, sosial, dan keagamaan ;
c. Kurangnya pemahaman dari OPD/lembaga teknis terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berakibat belum optimalnya

koordinasi dengan Sekretariat Daerah pada setiap kebijakan pimpinan daerah ;

d. Belum terpadunya aplikasi dan sistem informasi serta database pembangunan ;

Dengan memperhatikan faktor – faktor internal dan faktor eksternal di atas, Sekretariat Daerah Kota Blitar diharapkan mampu memanajemennya sehingga dapat berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Pelayanan OPD serta dapat mengatasi hambatan / kendala yang ada.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah yang terdiri dari 6 (enam) Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra, utamanya di bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum.
2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air, listrik dan telepon, karena masih tergabungnya Badan, Dinas dan Kantor lain dalam area Kantor Walikota Blitar, sehingga sulit untuk mengendalikan/mengontrol penggunaannya.
3. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.
4. Tuntutan transparansi yang menuntut adanya upaya bagi Kota Blitar untuk mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media yang dapat di akses masyarakat.
5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis daerah.
6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah belum diimbangi oleh seluruh OPD dan kedepan diperlukan formula yang lebih efektif dan efisien.

7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.
8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.
9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional.
10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan protokol harus segera menyesuaikan diri.
11. Perlunya adaptasi dan sosialisasi keprotokolan secara berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan.
12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Perubahan Tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pergeseran prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2020 yang fokusnya bergeser untuk:

1. Penanganan, recovery COVID, serta tatanan New Normal
2. Percepatan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan Tribulan Iitahun 2020.

Tabel 2.3

Perubahan Tema dan Prioritas Daerah Tahun 2020

	Sebelum	**Sesudah**
Tema Pembangunan	Tema: Pemantapan Daya Saing Ekonomi Daerah yang didukung Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas	Tema: Pemantapan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dengan fokus: Penanganan, Recovery, dan New Normal

	Sebelum	Sesudah
Prioritas Pembangunan	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Peningkatan kualitas kesehatan utamanya bagi ibu dan anak, serta kualitas Pendidikan masyarakat; 3. Percepatan kinerja pelayanan persampahan dan air minum yang layak, serta dukungan bagi ketahanan energi dan sumber daya air; 4. Penguatan produktivitas dan daya saing daerah yang berorientasi pada ekonomi kreatif dan inovatif; 5. Peningkatan nilai-nilai social masyarakat yang bersumber pada nilai agama dan kearifan local, serta dukungan kesuksesan pelaksanaan pemilu; 6. Pemantapan profesionalisme aparatur yang mendukung pelayanan publik dan reformasi birokrasi.	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Peningkatan kualitas kesehatan utamanya bagi ibu dan anak, serta kualitas pendidikan masyarakat 3. Penguatan produktivitas dan daya saing daerah yang berorientasi pada ekonomi kreatif dan inovatif 4. Percepatan kinerja pelayanan persampahan dan air minum yang layak, serta dukungan bagi ketahanan energi dan sumberdaya air 5. Peningkatan nilai-nilai local masyarakat yang bersumber pada nilai agama dan kearifan lokal serta dukungan kesuksesan pelaksanaan pemilu 6. Pemantapan profesionalisme aparatur yang mendukung pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Perubahan Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel dibawah :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2020
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	1.259.528.820	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	1.240.230.482	
1	Penyusunan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah OPD dengan predikat nilai pelaporan kinerja minimal memuaskan	27 OPD	482.862.600	Penyusunan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah OPD dengan predikat nilai pelaporan kinerja minimal memuaskan	27 OPD	467.002.600	
			Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	29 OPD				Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	29 OPD		
			Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	24 OPD				Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	24 OPD		
			Jumlah OPD yang hasil survey SKM nya berpredikat baik	28 OPD				Jumlah OPD yang hasil survey SKM nya berpredikat baik	28 OPD		
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah jenis Dokumen Pelaporan yang disusun	4 Dokumen	393.898.820	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah jenis Dokumen Pelaporan yang disusun	4 Dokumen	393.898.820	
			jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah	8 koordinasi				jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah	7 koordinasi		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain	6 kerjasama				Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain	6 kerjasama		
			Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	0 even				Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	0 even		
3	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah peserta rakor kewilayahan	129 orang	382.767.400	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan	Bagian Tata Pemerintahan	Jumlah peserta rakor kewilayahan	129 orang	379.329.062	
			Jumlah tingkatan lomba kelurahan yang difasilitasi	0 lomba				Jumlah tingkatan lomba kelurahan yang difasilitasi	0 lomba		
			Jumlah lomba sinergitas kecamatan yang difasilitasi	1 lomba				Jumlah lomba sinergitas kecamatan yang difasilitasi	1 lomba		
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21 kelurahan				Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21 kelurahan		
			Jumlah peserta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	860 orang				Jumlah peserta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	895 orang		
			Jumlah partisipasi lomba BBGRM yang diikuti dalam berbagai tingkatan	0 lomba				Jumlah partisipasi lomba BBGRM yang diikuti dalam berbagai tingkatan	0 lomba		
II	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Bagian Hukum dan Organisasi	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kaidah penulisan, isi dan kewenangan)	100 %	1.394.021.000	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Bagian Hukum dan Organisasi	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kaidah penulisan, isi dan kewenangan)	100 %	1.407.426.300	
1	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum dan Organisasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	10 raperda	275.121.800	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum dan Organisasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	10 raperda	295.121.800	
			Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	70 perwali				Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	70 perwali		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	500 SK				Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya	500 SK		
2	Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kedinasan	Bagian Hukum dan Organisasi	Jumlah Fasilitasi Kasus Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kedinasan	3 Kasus	586.033.800	Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kedinasan	Bagian Hukum dan Organisasi	Jumlah Fasilitasi Kasus Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kedinasan	3 Kasus	566.033.800	
			Jumlah Peserta Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	200 orang				Jumlah Peserta Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	200 orang		
3	Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum dan Organisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	200 orang	200.609.000	Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum dan Organisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	200 orang	220.479.000	
			Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	2 Produk Hukum				Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar	2 Produk Hukum		
	fasilitasi evaluasi roadmap reformasi birokrasi		Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun	1 Dokumen	111.869.100	fasilitasi evaluasi roadmap reformasi birokrasi		Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun	1 Dokumen	109.306.800	
4	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	2 kebijakan	149.567.300	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	2 kebijakan	145.664.900	
5	updating standar jabatan		Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	1.400 jabatan	70.820.000	updating standar jabatan		Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N	1.400 jabatan	70.820.000	
			Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N	900 jabatan				Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang	900 jabatan		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
								dihitung pada tahun ke-N			
			Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	1.400 jabatan				Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N	1.400 jabatan		
III	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya Kriteria Representatif adalah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki oleh tempat ibadah	90 %	5.737.330.200	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya Kriteria Representatif adalah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana standar yang harus dimiliki oleh tempat ibadah	93 %	5.705.074.044	
1	Fasilitasi pelayanan sosial keagamaan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi		5.737.330.200	Fasilitasi pelayanan sosial keagamaan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi		5.705.074.044	
			Jumlah Guru Ngaji dan Guru Minggu yang terfasilitasi	1.800 orang				Jumlah Guru Ngaji dan Guru Minggu yang terfasilitasi	1.687 orang		
			Jumlah even keagamaan / pengajian yang terfasilitasi	10 even				Jumlah even keagamaan / pengajian yang terfasilitasi	3 even		
			Jumlah Cabang Lomba MTQ yang diikuti	6 cabang				Jumlah Cabang Lomba MTQ yang diikuti	0 cabang		
IV	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	9 rumusan	706.791.100	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	9 rumusan	866.721.400	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian					Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	10 rumusan		
1	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	6 draf	75.500.000	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	6 draf	75.500.000	
2	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	6 draf	200.000.000	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	6 draf	200.000.000	
3	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang perekonomian	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	10 draf	431.291.100	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang perekonomian	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	10 draf	420.834.692	
V	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar	90 %	507.239.825	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar	90 %	375.000.000	
1	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	200 Orang	310.889.825	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai	200 Orang	220.889.825	
			Jumlah publikasi pada media massa:	4 media				Jumlah publikasi pada media massa:	2 media		
			Media Radio	120 siar				Media Radio	120 siar		
			Media Televisi	0 siar				Media Televisi	0 siar		
			Media Cetak	1 terbit				Media Cetak	0 terbit		
			Spanduk	51 unit				Spanduk	51 unit		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Baliho	4 unit				Baliho	4 unit		
			Jumlah publikasi pada Event Daerah	4 even				Jumlah publikasi pada Event Daerah	0 even		
2	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	2 dokumen	196.350.000	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	2 dokumen	175.000.000	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Bagian Umum	persentase partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	99.448.700	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Bagian Umum	persentase partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100 %	99.448.700	
1	Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	99.448.700	Pengelolaan Administrasi Dan Kelengkapan Kepegawaian	Bagian Umum	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	99.448.700	
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	12 Orang				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	12 Orang		
VII	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Bagian Umum	presentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	8.695.112.786	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Bagian Umum	presentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	8.551.375.786	
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Bagian Umum	Jumlah jenis alat tulis kantor yg tersedia	45 macam	1.522.418.700	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Bagian Umum	Jumlah jenis alat tulis kantor yg tersedia	45 macam	1.522.418.700	
			Jumlah barang cetakan yg tersedia	28 cetakan				Jumlah barang cetakan yg tersedia	28 cetakan		
			Jumlah lembar penggandaan	60.000 lembar				Jumlah lembar penggandaan	60.000 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	2 bahan bacaan				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg tersedia	2 bahan bacaan		
			jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1.750 dos/kotak				jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	3.681 dos/kotak		
			Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia porsi	1.750 porsi				Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia porsi	5.110 porsi		
			Jumlah jenis cinderamata khas daerah yang tersedia	3 macam				Jumlah jenis cinderamata khas daerah yang tersedia	3 macam		
2	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun (SKM)	1 dokumen	33.316.400	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun (SKM)	1 dokumen	33.316.400	
3	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Bagian Umum			4.509.700.000	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Bagian Umum			4.509.700.000	
			Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening				Jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening		
			Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	25 kendaraan				Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	65 kendaraan		
			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 komponen				Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 komponen		
			Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40 macam				Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40 macam		
			jumlah bangunan kantor yang terbangun	1 unit				jumlah bangunan kantor yang terbangun	1 unit		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0 unit				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0 unit		
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	12 macam				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	12 macam		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam		
			Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	4 unit				Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	4 unit		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 unit		
			Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	3 macam				Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	3 macam		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam		
			Jumlah bangunan kantor yang terehab	1 unit				Jumlah bangunan kantor yang terehab	1 unit		
			Jumlah rumah dinas yang terpelihara	3 unit				Jumlah rumah dinas yang terpelihara	3 unit		
4	Penyusunan Laporan Keuangan	Bagian Umum	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	12.681.000	Penyusunan Laporan Keuangan	Bagian Umum	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	12.681.000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Bagian Umum	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yg diikuti regional dan nasional	190 rapat koordinasi	750.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Bagian Umum	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yg diikuti regional dan nasional	190 rapat koordinasi	606.263.000	
6	Penyediaan Jasa Perkantoran	Bagian Umum	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	52 orang	1.866.996.686	Penyediaan Jasa Perkantoran	Bagian Umum	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	52 orang	1.866.996.686	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Bagian Umum	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100 %	2.913.315.405	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Bagian Umum	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100 %	2.704.128.405	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Bagian Umum	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi	25 macam	2.913.315.405	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	Bagian Umum	Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi	25 macam	2.704.128.405	
IX	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Bagian Humas dan Protokol	presentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	80 %	3.758.604.290	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Bagian Humas dan Protokol	presentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	80 %	3.843.258.490	
			presentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	78 %				presentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	78 %		
1	fasilitasi kehumasan pimpinan dan pemerintah daerah	Bagian Humas dan Protokol	jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:		1.780.368.090	fasilitasi kehumasan pimpinan dan pemerintah daerah	Bagian Humas dan Protokol	jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:		1.874.881.790	
			Foto	3.000 lembar				Foto	3.200 lembar		
			Video shooting	10 Video shooting				Video shooting	0 Video shooting		
			motion graphic	3 motion graphic				motion graphic	0 motion graphic		
			Spanduk	60 buah				Spanduk	79 buah		
			Joglo	20 unit				Joglo	0 unit		
			Baliho	15 unit				Baliho	28 unit		
			mini Banner	40 buah				mini Banner	0 buah		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			X baner	6 buah				X baner	0 buah		
			Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa					Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa			
			Jumpa Pers	2 Jumpa Pers				Jumpa Pers	0 Jumpa Pers		
			Media Radio	300 siar				Media Radio	800 siar		
			Media Televisi	50 siar				Media Televisi	45 siar		
			Media Cetak	320 terbit				Media Cetak	400 terbit		
								Media Online	800 terbit		
			Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun	320 Naskah				Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun	200 Naskah		
			Jumlah Rakor Bakohumas	2 rakor				Jumlah Rakor Bakohumas	0 rakor		
	fasilitasi keprotokolan dan acara kedinasan pemerintah daerah	Bagian Humas dan Protokol	Jumlah fasilitasi upacara sesuai standar keprotokolan	10 upacara	1.978.236.200	fasilitasi keprotokolan dan acara kedinasan pemerintah daerah	Bagian Humas dan Protokol	Jumlah fasilitasi upacara sesuai standar keprotokolan	4 upacara	1.968.376.700	
			Jumlah fasilitasi acara/even sesuai standar keprotokolan	2 even				Jumlah fasilitasi acara/even sesuai standar keprotokolan	2 even		
			Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	32 penerimaan				Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	20 penerimaan		
X	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	80 %	385.290.500	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	80 %	373.624.100	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kriteria OPD Tertib Administrasi Pembangunan: 1. Melaksanakan entry RUP pada SiRUP sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Menetapkan dan mengentry ke Sistem terkait Target Realisasi Kegiatan dan Anggaran; 3. Mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani; 4. Realisasi Anggaran sesuai dengan Target yang direncanakan					Kriteria OPD Tertib Administrasi Pembangunan: 1. Melaksanakan entry RUP pada SiRUP sebelum Tahun Anggaran berjalan; 2. Menetapkan dan mengentry ke Sistem terkait Target Realisasi Kegiatan dan Anggaran; 3. Mengentry realisasi fisik kegiatan segera setelah BA PPHP ditandatangani; 4. Realisasi Anggaran sesuai dengan Target yang direncanakan			
	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	jumlah pedoman yang tersusun	1 Pedoman	28.481.600	penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	jumlah pedoman yang tersusun	1 Pedoman	28.481.600	
			Jumlah draf rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan , penataaan ruang, perumahan dan permukiman, LH, Perhubungan, Kehutanan, ESDM serta bidang program administrasi pembangunan.	5 draf rumusan kebijakan				Jumlah draf rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan , penataaan ruang, perumahan dan permukiman, LH, Perhubungan, Kehutanan, ESDM serta bidang program administrasi pembangunan.	5 draf rumusan kebijakan		

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	356.808.900	pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	345.142.500	
			Jumlah draf rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan .	10 draf rumusan kebijakan				Jumlah draf rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan .	10 draf rumusan kebijakan		
			jumlah jenis dokumen yang pelaporan yang disusun	2 Dokumen				jumlah jenis dokumen yang pelaporan yang disusun	2 Dokumen		
XI	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	presentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	31.228.300	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	presentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100 %	31.228.300	
	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 Dokumen	31.228.300	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 Dokumen	31.228.300	
XII	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	persentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	98 %	838.032.950	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	persentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	98 %	799.973.350	

No	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan DPPA 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	96 Paket Lelang / Seleksi	470.209.150	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	96 Paket Lelang / Seleksi	432.149.550	
			jumlah fasilitasi dokumen pengadaan barang/jasa	96 Dokumen				jumlah fasilitasi dokumen pengadaan barang/jasa	96 Dokumen		
	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa		367.823.800	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan	Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa		367.823.800	
			Pejabat Pengadaan	70 Orang				Pejabat Pengadaan	70 Orang		
			UKPBJ dan Pokja	26 Orang				UKPBJ dan Pokja	26 Orang		
			PA /KPA	68 Orang				PA /KPA	68 Orang		
			PPK	120 Orang				PPK	120 Orang		
			Jumlah Personil yang mengikuti Forum IPFE, JFT dan Seminar dll)	12 Orang				Jumlah Personil yang mengikuti Forum IPFE, JFT dan Seminar dll)	12 Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020 di 3 (tiga) Kecamatan terdapat beberapa usulan kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk dalam Daftar Skala Prioritas (DSP) tersebut sebagian sudah terwadahi dalam program dan kegiatan yang ada pada RENJA 2020 ini sehingga tidak diperlukan lagi penambahan program dan kegiatan baru. Sedangkan usulan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, usulan tersebut telah disampaikan / diteruskan kepada OPD teknis.

Disamping DSP dari masing-masing Kecamatan se-Kota Blitar, masih terdapat usulan kegiatan masyarakat yang tergabung dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Blitar. Berdasarkan usulan yang masuk, sebagian telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga tidak diperlukan program dan kegiatan baru untuk mengakomodir usulan tersebut. Sedangkan sebagian usulan yang bukan merupakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, usulan tersebut telah disampaikan/diteruskan kepada OPD teknis yang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan APBD Kota Blitar

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berpegang pada arah kebijakan keuangan pada APBD Kota Blitar Tahun 2020 antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, serta juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Dengan melihat dinamika kondisi perekonomian secara nasional dan lingkup Jawa Timur, berpengaruh pada kondisi ekonomi makro di Kota Blitar yang mana diprediksikan juga mengalami pelambatan sampai dengan akhir tahun 2020 sehingga dimungkinkan tidak tercapainya target kinerja daerah. Penyesuaian asumsi-asumsi dasar penyusunan kebijakan keuangan pada perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan keuangan sebelumnya, untuk mendukung penanganan, recovery, dan new normal dampak pandemi COVID-19:
   a. Pengurangan target pendapatan asli daerah.
   b. Pengurangan penerimaan dari dana perimbangan
   c. Perubahan tema dan prioritas pembangunan yang implikasinya pada refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2019 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2020 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019;
3. Percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah daerah sebagai amanat RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021, berdasarkan hasil evaluasi; dan
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu sehingga Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatkan kemakmuran tempat ibadah sebagai aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase tempat ibadah aktif	Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1.Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin; 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin; 3.Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif.
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah pengajar agama / Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah Kota Blitar

		Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)

Tabel. 3.2.
Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET
1	Meningkatnya peran serta pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran tempat ibadah	Persentase peningkatan tempat ibadah yang representatif	Jumlah tempat ibadah yang representatif tahun n dikurangi Jumlah tempat ibadah yang representatif tahun n-1 / Jumlah tempat ibadah yang representatif tahun n-1 x 100%	1%
2	Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan diatasnya x 100%	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan	1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan Umum yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET
		2. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		3. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		4. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang menjadi kebijakan dibagi jumlah seluruh rumusan x 100%	100%
		5. Nilai SAKIP Setda minimal B	LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota Blitar	B
4	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	93

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET
5	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip, administrasi keuangan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta kehumasan dan keprotokolan	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	Hasil survey kepuasan masyarakat, KDH/WKDH, OPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat, dan arsip	baik
		2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	baik
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	baik
		4. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan kerumah tanggaan	baik
		5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	Hasil Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan dan keprotokolan	baik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Perubahan tema dan prioritas pembangunan implikasinya pada refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 yang diarahkan untuk penanganan, recovery, dan new normal dampak pandemic COVID-19 serta percepatan kinerja jangka menengah. Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menyusun rencana kerja tahun 2020 perubahan dan menguraikan dalam 12 (dua belas) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 25.922.740.916,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang berasal dari P-APBD Kota Blitar.

Adapun secara garis besar uraian mengenai perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2020 yang diturunkan dalam program, kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**URUSAN PENUNJANG**						
4.01	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**						
4.01.0201	**Bagian Tata Pemerintahan**				**1.871.034.000,00**	**1.259.528.820,00**	
4.01.0201.05	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	persentase penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	100 %	1.871.034.000,00	1.259.528.820,00	
		persentase laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	100 %	100 %			
4.01.0201.05.01	Penyusunan Dokumen Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	jumlah opd dengan predikat nilai pelaporan kinerja minimal memuaskan	27 opd	27 opd	826.694.000,00	482.862.600,00	Rasionalisasi PMK No 35 Tahun 2020 dan SE Walikota Blitar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 500/1345/410.206.3/2020 perihal penjadwalan ulang capaian program/kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 di Kota Blitar
		jumlah opd yang telah melakukan review sop	29 opd	29 opd			
		jumlah opd yang telah melakukan review standar pelayanan sesuai dengan peraturan	24 opd	24 opd			
		jumlah opd yang hasil survey skm nya berpredikat baik	28 opd	28 opd			
4.01.0201.05.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	jumlah jenis dokumen pelaporan yang disusun	6 jenis	4 jenis	524.623.800,00	393.898.820,00	Rasionalisasi PMK No 35 Tahun 2020 dan SE Walikota Blitar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 500/1345/410.206.3/2020 perihal penjadwalan ulang capaian program/kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 di Kota Blitar, adanya perubahan jadwal Pilkada, menyesuaikan dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
		jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	8 koordinasi	8 koordinasi			Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan APEKSI yang dibatalkan akibat Pandemi Covid-19
		jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah daerah/lembaga/ instansi lain	6 kerja sama	6 kerja sama			
		jumlah event asosiasi pemerintah kota yang diikuti	2 event	0 event			
4.01.0201.05.03	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan dan Kelurahan	jumlah peserta rakor kewilayahan	129 orang	129 orang	519.716.200,00	382.767.400,00	Rasionalisasi PMK No 35 Tahun 2020 dan SE Walikota Blitar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 500/1345/410.206.3/2020 perihal penjadwalan ulang capaian program/kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 di Kota Blitar, adanya pembatalan lomba Kelurahan dan BBGRM di tk Provinsi dan adanya penambahan jumlah RT
		jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan	21 kelurahan	21 kelurahan			
		jumlah lomba sinergitas kecamatan yang difasilitasi	1 lomba	1 lomba			
		jumlah tingkatan lomba kelurahan yang difasilitasi	1 lomba	0 lomba			
		jumlah partisipasi lomba bbgrm yang diikuti dalam berbagai tingkatan	1 lomba	0 lomba			
		jumlah peserta peningkatan peran lembaga kemasyarakatan	857 orang	860 orang			
4.01.0202	**Bagian Hukum dan Organisasi**				**1.412.605.600,00**	**1.394.021.000,00**	
4.01.0202.06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (kaidah penulisan, isi dan kewenangan)	100%	100%	1.412.605.600,00	1.394.021.000,00	
4.01.0202.06.01	Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah rancangan peraturan derah yang sesuai dengan peraturan diatasnya	10 raperda	10 raperda	307.300.000,00	275.121.800,00	Menyesuaikan dengan Kondisi dan Situasi, serta Protokol Covid
		jumlah peraturan walikota yang sesuai dengan peraturan diatasnya	70 perwali	70 perwali			
		jumlah keputusan walikota yang sesuai dengan peraturan diatasnya	500 sk	500 sk			
4.01.0202.06.02	Fasilitasi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kedinasan	jumlah fasilitasi kasus yang mendapat bantuan hukum kedinasan	3 kasus	3 kasus	442.649.200,00	586.033.800,00	potensi peningkatan perkara/sengketa
		jumlah peserta penyuluhan peraturan perundang-undangan	600 orang	200 orang			

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
4.01.0202.06.03	Dokumentasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	600 orang	200 orang	331.900.000,00	200.609.000,00	menyesuaikan kondisi dampak covid 19
		jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan dipublikasikan di web jdih kota blitar	2 produk hukum	2 jenis produk hukum			
4.01.0202.06.04	Fasilitasi evaluasi roadmap reformasi birokrasi	jumlah dokumen perubahan / penyempurnaan dokumen reformasi birokrasi kota blitar hasil reviu yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	77.300.000,00	111.869.100,00	Kebutuhan penyusunan peta proses bisnis, sop dan standar pelayanan, serta Protokol Covid
4.01.0202.06.05	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	jumlah kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi opd / unit kerja	2 kebijakan	2 kebijakan	146.156.400,00	149.567.300,00	Menyesuaikan dengan Kondisi dan Situasi, serta Protokol Covid
4.01.0202.06.06	Updating standar jabatan	jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-n	1.400 jabatan	1.400 jabatan	107.300.000,00	70.820.000,00	Menyesuaikan dengan Kondisi dan Situasi, serta Protokol Covid
		jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-n	900 jabatan	900 jabatan			
		jumlah jabatan yang telah memiliki standar abk yang dihitung pada tahun ke-n	1.400 jabatan	1.400 jabatan			
4.01.0203	**Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**				**7.501.941.125,00**	**6.951.361.125,00**	
4.01.0203.07	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	9 draft rumusan	9 draft rumusan	779.612.400,00	706.791.100,00	
		jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	9 rumusan kebijakan	9 rumusan kebijakan			
		jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	10 rumusan kebijakan perekonomian	10 rumusan kebijakan perekonomian			
4.01.0203.07.01	Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan	jumlah draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	6 draf rumusan	6 draf rumusan	110.060.000,00	75.500.000,00	Rasionalisasi Anggaran
4.01.0203.07.02	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat (perwali, juknis, sk, buku data, laporan)	6 draf rumusan	6 draf rumusan	202.261.300,00	200.000.000,00	Rasionalisasi Anggaran
4.01.0203.07.03	Fasilitasi Koordinasi dan perumusan kebijakan bidang perekonomian	jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomian	10 draf rumusan	10 draf rumusan	467.291.100,00	431.291.100,00	Rasionalisasi Anggaran

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
4.01.0203.11	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	persentase tempat ibadah yang representatif bagi pemeluknya	%	%	6.236.438.900,00	5.737.330.200,00	
4.01.0203.11.01	Fasilitasi pelayanan sosial keagamaan	jumlah event keagamaan / pengajian yang terfasilitasi	10 event keagamaan	10 event keagamaan	6.236.438.900,00	5.737.330.200,00	Rasionalisasi Anggaran
		jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi	1800 orang	1800 orang			
		jumlah cabang lomba mtq yang diikuti	6 cabang	6 cabang			
4.01.0203.13	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI	persentase penyerapan anggaran dbhcht kota blitar	90%	90%	485.889.825,00	507.239.825,00	
4.01.0203.13.01	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai	jumlah pelaporan dbhcht tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	175.000.000,00	196.350.000,00	Rasionalisasi Anggaran
4.01.0203.13.02	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	media radio	120 siar	120 siar	310.889.825,00	310.889.825,00	
		media cetak	1 terbit	1 terbit			
		spanduk	51 unit	51 unit			
		baliho	4 unit	4 unit			
		jumlah peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	200 orang	200 orang			
		jumlah publikasi pada media massa	4 media	4 media			
		jumlah publikasi pada event daerah	4 event	4 event			
4.01.0204	**Bagian Umum**				**13.175.387.191,00**	**11.707.876.891,00**	
4.01.0204.01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	persentase pelayanan adinistrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	100 %	9.307.261.886,00	8.695.112.786,00	
		presentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	100%			
4.01.0204.01.01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	45 macam	45 macam	1.450.835.200,00	1.522.418.700,00	Menyesuaikan kebutuhan, dan karena adanya pandemi covid 19
		jumlah barang cetakan yang tersedia	28 cetakan	28 cetakan			
		jumlah lembar penggandaan	60000 lembar	60000 lembar			
		jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	2 bahan bacaan			

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
		jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1750 dos/kotak	1750 dos/kotak			
		jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia porsi	1750 porsi	1750 porsi			
		jumlah jenis cinderamata khas daerah yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
4.01.0204.01.02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	190 rapat koordinasi	190 rapat koordinasi	1.100.000.000,00	750.000.000,00	
4.01.0204.01.03	Penyediaan Jasa Perkantoran	jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	52 orang	52 orang	1.866.996.686,00	1.866.996.686,00	
4.01.0204.01.04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	65 kendaraan	65 kendaraan	4.861.747.600,00	4.509.700.000,00	Menyesuaikan kebutuhan, dan adanya pandemi covid 19
		jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	29 komponen	29 komponen			
		jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	40 macam	40 macam			
		jumlah bangunan kantor yang terbangun	1 unit	1 unit			
		jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	0 kendaraan	0 kendaraan			
		jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	12 macam	12 macam			
		jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam	8 macam			
		jumlah bangunan kantor yang terpelihara	4 unit	4 unit			
		jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	17 unit	17 unit			
		jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	3 macam	3 macam			
		jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	3 macam	3 macam			
		jumlah bangunan kantor yang terehab	1 unit	1 unit			
		jumlah rumah dinas yang terpelihara	3 unit	3 unit			
		jumlah rekening yang terbayarkan	4 rekening	4 rekening			

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
4.01.0204.01.05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun (skm)	1 dokumen	1 dokumen	15.001.400,00	33.316.400,00	
4.01.0204.01.06	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	12.681.000,00	12.681.000,00	
4.01.0204.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	persentase partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	100%	121.641.300,00	99.448.700,00	
4.01.0204.02.01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 even	5 even	121.641.300,00	99.448.700,00	
		jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	12 orang	12 orang			
4.01.0204.08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	persentase pemenuhan pelayanan kedinasan kdh/wkdh	100%	100%	3.746.484.005,00	2.913.315.405,00	
4.01.0204.08.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah	jumlah penyelenggaraan tugas pimpinan daerah yang terfasilitasi	25 macam	25 macam	3.746.484.005,00	2.913.315.405,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan, dan karena adanya pandemi covid 19
4.01.0205	**Bagian Humas dan Protokol**				**4.354.135.090,00**	**3.758.604.290,00**	
4.01.0205.09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	presentase kegiatan kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	78%	78%	4.354.135.090,00	3.758.604.290,00	
		presentase pemberitaan positif kegiatan pembangunan di media massa	80%	80%			
4.01.0205.09.01	Fasilitasi keprotokolan dan acara kedinasan Pemerintah Daerah	jumlah fasilitasi upacara sesuai standar keprotokolan	10 upacara	6 upacara	2.434.267.000,00	1.978.236.200,00	RASIONALISASI PMK 35 TAHUN 2020
		jumlah fasilitasi penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	32 penerimaan	20 penerimaan			
		jumlah fasilitasi acara/even sesuai standart keprotokolan	2 even	2 even			
4.01.0205.09.02	Fasilitasi kehumasan pimpinan dan Pemerintah Daerah	publikasi di media cetak	320 terbit	1 siar	1.919.868.090,00	1.780.368.090,00	RASIONALISASI PMK 35 TAHUN 2020
		jumlah naskah sambutan pimpinan daerah yang disusun	320 naskah	380 terbit			
		jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:					
		foto	3000 lembar	3000 lembar			

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
		video shooting	10 video shooting	0 video shooting			
		motion graphic	3 motion graphic	0 motion graphic			
		spanduk	60 buah	75 buah			
		baliho2	15 buah	28 buah			
		joglo	20 buah	4 buah			
		mini banner	40 buah	0 buah			
		x banner	6 buah	0 buah			
		jumlah jumpa pers, rakor bakohumas dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa:					
		jumpa pers	2 jumpa pers	0 jumpa pers			
		jumlah rakor bakohumas	2 rakor	rakor			
		publikasi di media radio	300 siar	400 siar			
		publikasi di media televisi	50 siar	25 siar			
		publikasi di media cetak	320 naskah	380 terbit			
		jumlah naskah sambutan pimpinan daerah yang disusun		200 naskah			
		publikasi di media online		600 terbit			
		publikasi di media tv nasional	320 terbit	1 siar			
4.01.0206	**Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan**				**1.814.078.000,00**	**1.254.551.750,00**	
4.01.0206.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	presentase dokumen perencanaan dan pelaporan opd yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	100%	36.228.300,00	31.228.300,00	

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
4.01.0206.03.01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (dpa, dppa, renja, p-renja, rkt, pk, ra)	7 dokumen	7 dokumen	36.228.300,00	31.228.300,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
4.01.0206.10	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	persentase opd kategori tertib administrasi pembangunan	80%	80%	747.066.900,00	385.290.500,00	
		persentase opd kategori tertib administrasi pembangunan	70%	70%			
4.01.0206.10.01	Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah	jumlah pedoman yang tersusun	1 pedoman	1 pedoman	168.121.600,00	28.481.600,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
		jumlah draft rumusan kebijakan pembangunanan daerah urusan pekerjaan umum, perumahan , penataaan ruang, perumahan dan permukiman, lh, perhubungan, kehutanan, esdm serta bidang program administrasi pembangunan	5 draft rumusan kebijakan	5 draft rumusan kebijakan			
4.01.0206.10.02	Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	4 dokumen	4 dokumen	578.945.300,00	356.808.900,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
		jumlah rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan	10 rumusan kebijakan			
		pembangunanan daerah urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan .					
		jumlah jenis dokumen pelaporan yang disusun (lkjip, lppd)	2 dokumen	2 dokumen			
4.01.0206.12	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	presentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement	98%	98%	1.030.782.800,00	838.032.950,00	
4.01.0206.12.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui lelang/seleksi yang telah berhasil dilaksanakan	96 paket lelang/ seleksi	96 paket lelang/ seleksi	573.212.600,00	470.209.150,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
		jumlah fasilitasi dokumen pengadaan barang/jasa	96 dokumen	96 dokumen			

KODE	URUSAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCAME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			Sebelum Perubahan	Perubahan	Sebelum Perubahan	Perubahan	
4.01.0206.12.02	Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	jumlah personil yang mengikuti forum ipfe, jft dan seminar	12 orang	12 orang	457.570.200,00	367.823.800,00	Menyesuaikan dengan kebutuhan
		jumlah personil yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang/jasa					
		- pejabat pengadaaan	70 orang	70 orang			
		- ukpbj dan pokja pemilihan	26 orang	26 orang			
		- pa dan kpa	68 orang	68 orang			
		- ppk	120 orang	120 orang			

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Blitar ini, tidak hanya sekedar memenuhi amanat dan menggugurkan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, namun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi pihak–pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan, serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2020. Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Perubahan Tahun 2020 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2020.

Selanjutnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah ini digunakan sebagai dasar acuan dalam memasukkan program kegiatan ke dalam KUPA, PPASP dan perencanaan program kegiatan serta nantinya dipergunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2020 pada Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Dalam Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif dimana dalam pelaksanaannya masih harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia, serta guna mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Perubahan tahun 2020 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Disamping kemampuan anggaran, dalam renja perubahan ini telah ditetapkan target dan capaian kinerja. Namun guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada baik di lingkungan internal dan eksternal OPD, target dan capaian kinerja tersebut dapat dilakukan review dan penyesuaian

terhadap inidikator-indikator yang ada serta terhadap pengalokasi anggaran pada program dan kegiatan dimaksud

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2020 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* dan meningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601219 198702 1 003